

## IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT KURANG MAMPU DIDESA WASILEI KECAMATAN WASILEI SELATAN KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

*Juan Riko Bawenti<sup>1</sup>*  
*Frans C Singkoh<sup>2</sup>*  
*Alfon Kimbal<sup>3</sup>*

### Abstrak

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan fasilitas pemerintah untuk membantu pelaksanaan pembangunan rumah atau perumahan yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman secara swadaya. Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya membutuhkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuannya yaitu menyediakan rumah yang layak huni. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Wasilei. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder di mana pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Teknik analisa data yang digunakan yaitu editing, koding dan tabulation. Secara umum menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Desa Wasilei terdapat pelaksanaannya yang telah tercapai dan ada yang belum tercapai sepenuhnya. Adapun pelaksanaan yang telah tercapai yaitu pada indicator evisiensi dan ketepatan, sedangkan pada indikator efektivitas kecukupan , perataan dan responsivitas hingga saat ini belum tercapai sepenuhnya.

**Kata Kunci : Implementasi Program, Pembangunan Perumahan, Pemerintah.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat.

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi.

## Pendahuluan

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya. Sebagai upaya dalam peningkatan pelayanan penyediaan rumah layak huni maka perlu dibangun suatu sistem penyediaan rumah layak huni yang memenuhi syarat secara kualitas maupun kuantitas serta terjangkau oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diatur dalam Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 07 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat (BSPS) adalah bantuan pemerintah berupa bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

Usaha pemerintah dalam hal memenuhi kebutuhan perumahan layak huni ini terus berlanjut. Dalam Undang-Undang dan Peraturan Menteri yang sudah dijelaskan sebelumnya, adanya program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini merupakan salah satu bentuk usaha pemerintah yang tiada hentinya dalam memperhtikan krisis kebutuhan rumah layak huni saat ini. Program ini dirancang dan dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan Rakyat (KEMENPERA)

bekerja sama dengan Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang peruntukannya diberikan ke Provinsi, Kabupaten, dan Desa. Besaran bantuan yang disalurkan untuk pembangunan baru Rp 30 juta, untuk Peningkatan Kualitas (PK) dengan klasifikasi rumah rusak ringan atau tidak memenuhi persyaratan kesehatan Rp 7,5 juta, rumah rusak sedang Rp 10 juta, dan rumah rusak berat Rp 15 juta. Bantuan ini diberikan dalam bentuk bahan bangunan sehingga bisa segera dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membangun rumahnya. Program ini berikan kepada setiap Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) atau miskin yang tidak memiliki rumah layak huni. Dengan adanya pemberian bantuan dan kegiatan yang ada didalam Program ini bertujuan untuk meringkankan keluarga miskin dan meningkatkan taraf hidup masyarakat untuk memiliki rumah layak huni.

Kabupaten Halmahera Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Maluku utara, Indonesia. Dengan luas wilayah Kabupaten Halmahera Timur yaitu 6.571,37 KM dengan jumlah penduduk sekitar 90.924 jiwa. Wilayahnya meliputi 10 Kecamatan, berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Timur, pada tahun 2018 melalui Kementerian Perumahan Rakyat Satuan Kerja Pemberdayaan Perumahan Swadaya menetapkan Kecamatan Wasile Selatan sebagai penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bedasarkan Surat Keputusan Deputi Bidang Perumahan Swadaya No: 03 Tahun 2018 tentang Penetapan Desa/kelurahan Lokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Tahun 2018 dengan menetapkan Desa Wasilei Kecamatan

Wasile Selatan sebagai penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tahun anggaran 2018. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini merupakan program bantuan dana tunai yang diberikan oleh Kementerian Perumahan Rakyat kepada penerima program yaitu dalam hal ini ialah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Setelah lolos verifikasi dana bantuan yang diberikan sebanyak 500 juta rupiah dan rencana akan dialokasikan Sebanyak 50 Kepala Keluarga dan 50 kepala keluarga tersebut telah dimasukkan dalam program bedah rumah. Masing-masing kepala keluarga penerima bantuan mendapatkan bantuan dana bedah rumah sebesar 15 juta rupiah dan diturunkan melalui dua tahap, tahap pertama berupa uang tunai sebesar 7,5 juta rupiah yang dicairkan melalui Bank dan tahap kedua yaitu berupa barang/bahan bangunan yang senilai dengan uang 7,5

Setelah pelaksanaan program bantuan rumah stimulan ini berlangsung, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Program Bedah Rumah adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Namun disisi lain ternyata program ini juga membuat masyarakat penerima bantuan merasa terbebani. Hal ini disebabkan oleh banyaknya persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Badan Perencanaan Peraturan Daerah (BAPPEDA) yang membuat masyarakat penerima merasa terbebani, salah satu contohnya ialah ketika dana tahap pertama turun berupa uang 7,5 juta rupiah untuk masing-masing kepala

keluarga rata-rata hanya cukup untuk membangun pondasi rumah saja. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang pada dasarnya adalah sebagai dana suntikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan pembangunan, bagi masyarakat Desa Wasilei tidak terima sebagai demikian. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa bantuan ini adalah bantuan bedah rumah sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat sangat ketergantungan dengan dana yang diberikan tanpa ada inisiatif lain untuk lebih meningkatkan kualitas rumahnya.

## Tinjauan Pustaka

Implementasi berasal dari bahasa inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau terhadap akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Implementasi pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik ada dua pilihan langkah yang ada yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui informasi kebijakan derivet atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu melalui program, proyek melalui kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan

diturunkan berupa program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya terwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Adapun makna implementasi menurut Mazmanian, Daniel H dan Paul A, Sabatier (1983) sebagai dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Peter S.Cleaves dalam bukunya Solichin Abdul Wahab (2008;187), yang secara tegas menyebutkan bahwa: *Implementasi itu mencakup "a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps"* (Cleaves,1980). Secara garis besar, beliau mengatakan bahwa fungsi implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan

tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik diwujudkan sebagai outcome hasil akhir kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan publik disebut "*policy delivery system*" (sistem pencapaian/perusahaan kebijakan public) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang atau didesain secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki.

Dari beberapa teori tentang implementasi maka penulis menggunakan Teori nya George C. Edward III (dalam buku Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

#### 1) Komunikasi

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya sangat menentukan keberhasilan mencapai tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Mengetahui atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan atau dikomunikasikan kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap



kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu:

a) Transmisi. penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*misscommunication*).

b) Kejelasan. komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, parah pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

c) Konsistensi. pemerintah yang diberikan dalam melaksanakan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas untuk diterapkan atau dijalankan. Karena jika pemerintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

## 2) Sumber Daya.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu;

a) Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam

implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup, tetapi diperlukan juga kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.

b) Informasi. Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apayang harus mereka lakukan saat mereka diberi perintah. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang ditetapkan. Implementer harus mengetahui orang yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum

c) Wewenang. Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Disitu pihak, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselenggarakan oleh

parah pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.

d) Fasilitas. Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencakup, mengerti apa yang harus dilakukan dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak berhasil.

3) Disposisi

Variabel ketiga yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah disposisi. Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

a) Pengangkatan birokrat. Disposisi atau sikap pelaksanaan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu pemilihan dan peningkatan personil pelaksanaan kebijakan haruslah orang-orang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan.

b) Insentif. Edward menyatakan bahwa salah satu yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi

faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi

4) Struktur birokrasi

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumberdaya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Implementasi kebijakan mengarah pada apa yang terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yaitu peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses, baik usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Berikut ada beberapa pendaat para ahli tentang Implementasi Kebijakan

## Metode Penelitian

penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2013) metode deskriptif-kualitatif adalah

produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, Williams (Moleong, 2013) menulis bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.

Menurut Moleong (2013) bahwa penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian-pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Bungin (2012) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berbijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan, Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya .

Adapun yang menjadi fokus penelitian dalam hal ini Implementasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya bagi Masyarakat yang Mampu di Desa Wasilei yaitu “ siapa yang menerima bantuan stimulan perumahan, apa yang dilaksanakan, melalui apa, kepada siapa, dan apa pengaruhnya”.

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan latar penelitian, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Oleh karena itu seorang informan harus benar-benar tahu pelaku yang terlibat langsung dengan permasalahan penelitian. Memilih seorang informan

harus dilihat kompetensinya bukan hanya sekedar untuk menghadirkannya (Moleong 2006:132).

Berikut ini informan-informan yang menjadi sumber data dalam penelitian ialah:

1. Kabid Perumahan 1 orang
2. Pegawai 1 orang
3. Kepala Kesa 1 orang
4. Masyarakat penerima bantuan 3 orang

## Hasil Penelitian

### 1. Permasalahan dalam Dana BPS

Setelah pelaksanaan program bantuan rumah stimulan ini berlangsung, ternyata program tersebut dinilai masih belum maksimal. Sebagaimana tujuan dari Program Bedah Rumah adalah upaya pemerintah untuk membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam membangun rumah layak huni untuk mensejahterakan masyarakat. Namun disisi lain ternyata program ini juga membuat masyarakat penerima bantuan merasa terbebani. Hal ini disebabkan oleh Badan Perencanaan Peraturan Daerah (BAPPEDA) yang membuat masyarakat penerima merasa terbebani, salah satu contohnya ialah ketika dana tahap pertama turun berupa uang Rp.7.500.000,00 untuk masing-masing kepala keluarga rata-rata hanya cukup untuk membangun pondasi rumah saja.

Bantuan dana Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang pada dasarnya adalah sebagai dana suntikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah untuk melakukan pembangunan, bagi masyarakat Desa Wasilei tidak terima sebagai demikian. Pada umumnya masyarakat beranggapan bahwa bantuan ini adalah bantuan bedah rumah sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat sangat

ketergantungan dengan dana yang diberikan tanpa ada inisiatif lain untuk lebih meningkatkan kualitas rumahnya.

## 2. Kurangnya SDM Dalam Pembangunan Perumahan Di Desa Wasilei

Dalam pelaksanaan program ini terdapat juga permasalahan dalam Sumber Daya Manusia yaitu tentang SDM yang terdapat di Desa Wasilei. Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, jika personil yang melakukannya tidak mempunyai sumber-sumber untuk melaksanakan pekerjaan secara efektif. Untuk mengetahui berbagai keberadaan sumber-sumber yang terkait dengan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Wasilei. Sumber daya yang dimaksud dapat berwujud sumber daya manusia, uang, sarana/prasarana. Untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dibutuhkan ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Dalam pelaksanaan program BSPS di Desa Wasilei terhambat salah satunya dikarenakan sumber daya manusia yang ada tidak memadai.

## 3. Estimasi waktu Pengerjaan Pembangunan Rumah Yang Terlalu Lama.

Dalam pelaksanaan program ini juga terdapat terdapat kendala pada dana ke dua yang terlalu lama turun.

## 4. Permasalahan dalam peraturan Program BSPS.

Selain permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan program bantuan stimulan ada juga beberpa peraturan didalam kriteria penerimaan bantuan yaitu tentang penerima bantuan harus mendapatkan penghasilan di bawah upah minimum regional, namun di salah satu peraturan lainnya ada juga yang menyebutkan bahwa dalam syarat penerima bantuan harus memiliki dana

swadaya dalam bentuk uang atau tabungan. Di sini pemerintah beranggapan membayar upah pekerja dan konsumsi kelompok dalam pembangunan dan retribusi perijinan.

Dengan kedua peraturan yang saya sebutkan itu menunjukkan bahwa pemerintah tidak sungguh-sungguh dalam membantu masyarakat miskin, dapat dikatakan program ini hanya membantu orang yang mempunyai dana simpangan atau tabungan untuk dijadikan dana tambahan BSPS, dapat dikatakan bantuan ini hanya di peruntukan bagi orang yang mampu saja, bagaimana jika ada salah satu keluarga yang sudah tua yang sangat membutuhkan bantuan, jangankan mempunyai tabungan dana tambahan BSPS untuk kehidupan sehari-harinya saja mereka hanya bercukupan, apakah keluarga tersebut tidak berhak menerima bantuan BSPS. Ini tidak sesuai dengan konsep program bedah rumah itu sendiri yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. ( Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No 07 Tahun 2018 pasal 1 ayat 1 dan 2)

## 5. Inefisiensi Program BSPS Di Desa Wasilei



Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ini dapat dikatakan efisien atau tidaknya dilihat dari proses pelaksanaannya, apakah proses berjalan dengan baik tanpa ada hambatan.

Bedasarkan hasil yang diperoleh peneliti dapat dikatakan bahwa program bantuan BSPS di Desa Wasilei belum dapat dikatakan efisien karena masih adanya hambatan yang terjadi pada pembangunan tahap pertama di karenakan kurangnya sumberdaya manusia di desa wasilei ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Desa tersebut sebagian besar berpotensi sebagai petani kelapa dan nelayan hal ini yang di sebabkan terjadinya hambatan pada pencairan dana ke dua yang disebabkan keterlambatan pada bangunan tahap pertama.

Dari hasil yang di dapat peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan rumah swadaya di Desa Wasilei dapat dikatakan belum berjalan efisien. Maka dari itu pemerintah harus melakukan evaluasi dalam mekanisme perencanaan pembangunan rumah dengan cara menambah dana tambahan untuk membangun rumah tanpa harus memotong dana tahap pertama yang digunakan untuk membangun pondasi dan tembok rumah.

## Kesimpulan

Dalam pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya di Kabupaten Halmahera Timur yang telah dilaksanakan di Desa Wasilei, Kecamatan Wasilei Selatan yang telah berlangsung pada tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur telah menyalurkan dana bantuan sebanyak 500 juta rupiah dan akan di alokasikan Sebanyak 50 rumah kepala

keluarga tersebut di Desa wasilei ini dengan tujuan meningkatkan kualitas rumah penduduk bagi rakyat yang kurang mampu. Dapat dikatakan program ini telah berhasil dikarenakan sudah berlangsung dan mendapat apresiasi dari masyarakat desa yang mendapatkan bantuan.

Namun walaupun kebijakan tersebut berhasil ada beberapa masalah yang saya temukan di dalam penelitian yang terdapat didalam peraturan kebijakan tersebut yaitu mekanisme persyaratan mendapatkan bantuan rumah stimulan, dan kurangnya sumber daya manusia dalam pembangunan rumah dikarenakan tidak semua masyarakat di Desa Wasilei yang menyebabkan terlambatnya pembangunan, yang menyebabkan terlambatnya pembangunan rumah ialah turunnya dana ke dua. Maka dari itu penulis menggunakan teori G.C.Edward III dalam buku Subarsono,2011:90-92. Yaitu dengan adanya Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi kita dapat mengetahui berapa besar kebijakan tersebut mempengaruhi output dari suatu kebijakan.

Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi perlu dilakukan untuk melihat dampak positif maupun negatif yang ditimbulkan dengan adanya implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apabila terjadi penyimpangan maka ke empat variabel tersebut sangat bermanfaat dalam hal mengindikasikan bahwa benar terjadi penyimpangan dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target, sebagai masukan yang akan datang.

## Saran

Dari hasil penelitian yang di dapat dari kesimpulan akhir penelitian,

mendapatkan dua poin yang bisa dijadikan saran penelitian ini terkait dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Wasilei

1. Pemerintah Desa diwajibkan menyampaikan aspirasi terhadap masyarakat agar saling berkomunikasi satu sama lain dan mampu bekerja sama (gotong royong) dalam membantu pembangunan di Desa maupun pembangunan bantuan stimulan perumahan yang ada di desa wasilei
2. Pada proses pembangunan yang ada di desa, diharapkan pemerintah desa lebih banyak berpartisipasi pada pembangunan yang ada di desa dan berkomunikasi dengan masyarakat agar apa yang menjadi program desa kedepan bisa dilakukan secara bersama-sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis kebijaksanaan Negara*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Agustino Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- AG. Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi)*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik: Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung : PT. Refika Pratama.
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV ALFABETA.
- Syawie, M , Suhendi, A. 2012. *Pemberdayaan Keluarga Miskin Berbasis Komunitas Melalui Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Studi di Desa Jambu kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat)*, Sosiokonsepia Vol. 17, No. 03.
- Winarno Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Media Presindo Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Kantor Desa Wasilei 2019.